



**EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
PENGELUARAN KAS (STUDI KASUS PADA KPRI INSKO DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI SUMATERA UTARA)**

Laksamana Aru Sulaiman¹, Imsar², Rahmat Daim Harahap³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
¹arusulaiman39@gmail.com, ²imsar@uinsu.ac.id, ³rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id

Info Artikel :

Diterima : 13 Desember 2021

Disetujui : 24 Desember 2021

Dipublikasikan : 28 Januari 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, hasil evaluasi, dan kendala-kendala evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode komparatif (perbandingan) antara teori unsur-unsur pengendalian internal terhadap pengeluaran kas dengan pelaksanaannya. Instrumen dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara masih belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan unsur-unsur teori sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, yaitu ada fungsi, prosedur, dan dokumen terkait yang sudah sesuai dengan teori dalam sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, dan hanya menggunakan laporan arus kas. Juga terdapat kendala-kendala tidak adanya pemeriksaan secara mendadak terhadap fungsi kas, dan badan pengawas yang belum menggunakan pihak independen. Implikasi penelitian ini terhadap KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara adalah agar pelaksanaan sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas bisa berjalan lebih baik dan maksimal, sehingga tujuan awal koperasi bisa tercapai..

Kata Kunci:
Evaluasi,
Sistem
Pengendalian
Internal,
Pengeluaran
Kas

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation, evaluation results, and evaluation of the internal control system evaluation constraints on cash disbursements at KPRI INSKO Cooperatives and SMEs Office of North Sumatra Province. The types of data used in this research are qualitative and quantitative, with primary and secondary data sources. The research approach in this study is descriptive qualitative research with a comparative method (comparison) between the theory of elements of internal control on cash disbursements and their implementation. The instruments in this study were observation, interviews, and documentation. The data analysis technique in this research is comparative

Keywords:
Evaluation,
Internal
Control System,
Cash
Disbursement

qualitative descriptive. The results showed that the internal control system for cash disbursements at KPRI INSKO Cooperatives and SMEs Office of North Sumatra Province was still not running well and not in accordance with the elements of the theory of the internal control system for cash disbursements, namely there are functions, procedures, and related documents that is in accordance with the theory in internal control of cash disbursements, and only uses the cash flow statement. There are also problems that there is no direct examination of the cash function, and the supervisory body has not used an independent party. The implication of this research for KPRI INSKO Cooperatives and SMEs Office of North Sumatra Province is that the implementation of the internal control system for cash disbursements can run better and maximally, so that the initial goals of the cooperative can be achieved..

PENDAHULUAN

Transaksi pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, semuanya masih dicatat secara manual. Untuk laporan keuangan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara juga masih melakukan pencatatan dengan sistem manual, belum menggunakan aplikasi. Dan untuk aktivitas pengendalian intern yakni pengawasan pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dilakukan oleh Badan Pengawas, yang terdiri dari 1 (satu) ketua 1 (satu) sekretaris, dan 1 (satu) anggota. Aktivitas pengawasan tersebut masih dilakukan secara bersama-sama, karena sejauh ini belum dilakukan pemisahan fungsi dan tanggung jawab[1]

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, ternyata KPRI INSKO belum menerapkan sistem komputerisasi dalam pengolahan data akuntansi. Tugas unit ini membutuhkan suatu perencanaan kas yang efektif dan efisien. Dengan berperannya kas dalam kegiatan koperasi, maka koperasi harus memastikan bahwa apakah sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas sudah berjalan dengan baik atau belum.

Belum adanya pemisahan tugas seperti fungsi kredit dan kasir dimana kedua fungsi ini hanya dilakukan oleh seorang bendahara saja. Dalam hal ini kemungkinan bisa terjadi penyalahgunaan wewenang profesi dan juga bisa terjadi penyelewengan uang kas dalam transaksi yang menyebabkan timbulnya kerugian yang disebabkan penggunaan uang kas yang tidak perlu dikeluarkan harus dikeluarkan sehingga membuat penggunaan uang tersebut tidak berjalan dengan efektif. Dalam hal ini diperlukan adanya suatu pengawasan administrasi yang baik untuk menghindari resiko tersebut. Pengawasan tersebut dapat berupa penataan intern koperasi yang meliputi pemberlakuan sistem informasi akuntansi yang baik, menciptakan prosedur-prosedur akuntansi yang dapat mencegah timbulnya penyelewengan, penipuan, penggelapan, pemborosan terhadap harta kekayaan koperasi atau praktek-praktek lain yang dapat merugikan koperasi. Juga pada sektor Badan Pengawas, masih dipilih melalui sesama anggota KPRI INSKO berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang melaksanakan pengendalian intern secara bersama-sama. Karena fungsi dari sektor Badan Pengawas masih dijalankan oleh sesama anggota KPRI INSKO tanpa melibatkan pihak independen, maka pengendalian intern pada KPRI INSKO masih belum berjalan secara efektif.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara? (2) Bagaimana hasil evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara?, (3) Apa kendala yang terdapat dalam evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara?

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Untuk mengetahui tentang sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, (2) Untuk mengetahui tentang hasil evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, (3) Untuk mengetahui tentang kendala yang terdapat dalam evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang dilakukan oleh Serli Septriani (2018) yang berjudul Evaluasi Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada CV. Pemuda Jaya Karsa Kota Bengkulu menyatakan bahwa, evaluasi penerapan sistem pengendalian intern terhadap pengeluaran kas pada CV. Pemuda Jaya Karsa Kota Bengkulu belum berjalan dengan baik karena belum semua penerapan berjalan dengan baik. Ada beberapa struktur kerja pada CV tersebut belum berjalan sesuai teori, namun ada yang sudah terlihat bagaimana karyawan perusahaan mau bertanggung jawab atas semua kas keluar masuk di perusahaan. CV. Pemuda Jaya Karsa mengadakan pengauditan kas kepada pegawai yang bertanggung jawab sehingga tidak ada penyelewengan keuangan pada kas. Namun pada sistem pengauditan laporan keuangan ini belum berjalan dengan baik karena dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali seharusnya dilakukan setiap bulan pada akhir bulan untuk benar-benar mengurangi resiko kecurangan penyelewengan kas. Dengan cara pengauditan yang rutin sehingga membuat efektivitas kerja karyawan yang ada di perusahaan berjalan dengan efektif. CV. Pemuda Jaya Karsa juga belum menggunakan formulir nomor urut tercetak, sistem akuntansi pengeluaran kas suatu perusahaan harus dapat menyediakan adanya jejak audit yang lengkap atas setiap transaksi. Auditor dapat mengajukan pertanyaan atau wawancara dengan staf akuntansi. Tidak adanya perputaran jabatan dalam struktur organisasi pada CV. Pemuda Jaya Karsa karena terbatasnya sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan pendapatan perusahaan yang belum berjalan dengan baik terlihat pada perusahaan tersebut untuk pengeluaran kas kecil belum mendapatkan otorisasi terlebih dahulu dari pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi transaksi kas kecil.

Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.[2]

Sistem pengendalian intern adalah Seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aktiva atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.[3]

Pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat penting sekali dalam pencapaian tujuan usaha. Demikian pula dunia usaha mempunyai perhatian yang makin meningkat terhadap pengendalian intern. Pengendalian intern adalah semua rencana organisasional, metode dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.[4]

Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian intern yang diciptakan dalam perusahaan harus mempunyai tujuan, yakni agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan, sehingga mampu meminimalisasikan kesalahan- kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

Pengertian Kas

Kas (*Cash*) adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas/logam dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar/alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. Kas adalah uang tunai yang paling liquid sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari asset. Yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank.[5]

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengungkapkan pengertian kas adalah “Kas terdiri atas saldo kas (*Cash On Hand*), rekening giro, atau setara kas (*Cash Equivalent*) adalah sebuah investasi yang bersifat sangat likuid, berjangka pendek dan bisa dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko atas perubahan nilai yang signifikan”. [6]

Pengertian Pengeluaran Kas

Sistem akuntansi pengeluaran kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai yang digunakan untuk kegiatan perusahaan. Pengeluaran-pengeluaran dalam jumlah kecil dilakukan melalui dana kas kecil, semua pengeluaran kas harus memperoleh persetujuan dari yang berwenang terlebih dahulu dan terdapat pemisahan tugas antara yang berhak menyetujui pengeluaran kas yang menyimpan uang kas dan melakukan pengeluaran serta yang mencatat pengeluaran.

Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan aktifitas pada siklus pengeluaran dan pembelian (bukan penggajian), diawali dengan melakukan pesanan, kemudian barang datang dan diterima dan disimpan, melakukan pembayaran faktur pembelian. Pada awalnya, dari pemasok secara elektronik menyampaikan informasi mengenai pengiriman barang yang akan sampai petugas bagian penerimaan dengan sistem proses

permintaan melakukan verifikasi terhadap barang yang dikirim tersebut, ketepatan waktu kiriman juga menjadi bahan pertimbangan.[7]

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas

Suatu sistem terdiri dari sub-sub atau unsur pembentuk sistem yang saling berhubungan dan saling ketergantungan bahkan mungkin saja dapat mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Begitu juga suatu pengendalian intern yang memadai harus terdiri dari unsur-unsur yang membentuk pengendalian intern tersebut. Sistem pengendalian intern pengeluaran kas, yaitu : (1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan, (2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi, (3) Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktek yang sehat dalam pelaksanaannya, (4) Karyawan yang mutunya sesuai tanggung jawab, bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi prosedur pencatatan serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktek yang sehat, semua sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya.[8]

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena mendeskripsikan data berupa laporan pengeluaran kas tahun buku 2020 melakukan evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, menjelaskan kendala-kendala yang terdapat pada evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, serta menjelaskan hasil evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara secara kualitatif.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Jenis data kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau berbentuk uraian. Dalam hal ini yaitu uraian laporan pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan jenis data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung oleh sumbernya dan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa dokumentasi laporan pengendalian intern dan pengeluaran kas.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) Observasi, (2) Wawancara, (3) Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode komparatif (perbandingan), yaitu berupa penjelasan atas data-data yang diperoleh kemudian membandingkan antara teori yang ada dengan penerapan yang terjadi di lapangan. Tahapannya adalah : (1) Pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) Penyajian data, (4) Mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan temuan penelitian di atas, maka dilakukan evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dengan cara membandingkan teori sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas dengan pelaksanaan yang terjadi pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

A. Perbandingan Unsur-unsur teori Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Dengan Pelaksanaannya pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

1. Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional Secara Tegas

KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara belum memisahkan beberapa fungsi.

Tabel 4.1

Perbandingan Teori Tentang Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional Secara Tegas Dengan Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Teori	Praktik	Keterangan
1) Fungsi Penjualan Terpisah dari Fungsi Kas	Tidak	KPRI INSKO belum memisahkan kedua fungsi ini. Dikarenakan KPRI INSKO belum mempunyai karyawan khusus di bagian penjualan, pembelian, dan kas.
2) Fungsi Kas Terpisah Dengan Fungsi Akuntansi	Ya	Kedua fungsi tersebut terpisah namun semua pencatatan akuntansi dan transaksi masih dipegang oleh seorang bendahara saja.
3) Fungsi Gedung Terpisah Dari Fungsi Pengiriman	Tidak	Fungsi ini tidak diterapkan pada KPRI INSKO.
4) Transaksi Penjualan dilaksanakan oleh lebih dari satu	Tidak	Transaksi penjualan di KPRI INSKO belum dilaksanakan

fungsi	oleh lebih dari satu fungsi, ini dilihat dengan adanya penggabungan fungsi penjualan dan fungsi kas.
--------	--

2. Sistem Wewenang Dan Prosedur Pencatatan Yang Memberikan Perlindungan yang Cukup Terhadap Kekayaan, Utang, Pendapatan Dan Biaya

Adapun sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya belum berjalan dengan baik adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2

Perbandingan Teori Tentang Sistem Wewenang Dan Prosedur Pencatatan Yang Memberikan Perlindungan yang Cukup Terhadap Kekayaan, Utang, Pendapatan Dan Biaya Dengan Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Teori	Praktik	Keterangan
1) Pengeluaran kas diotorisasi oleh fungsi kas	Ya	Fungsi pengeluaran kas sudah dijalankan pada KPRI INSKO dengan membubuhkan tanda resmi berupa stemple saat kas sudah dikeluarkan.
2) Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman	Tidak	Tidak dijalankan pada KPRI INSKO
3) Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi	Tidak	Tidak dijalankan pada KPRI INSKO

3. Praktik yang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Setiap Unit Organisasi

Praktik yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap unit di koperasi belum berjalan dengan baik dilakukan oleh KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 4.3

Perbandingan Teori Praktik yang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Setiap Unit Organisasi Dengan Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Teori	Praktik	Keterangan
1) Faktur bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan	Tidak	Faktur yang digunakan di KPRI INSKO belum bernomor urut cetak, jadi belum menunjukkan pengendalian internal yang cukup baik
2) Jumlah yang diterima dari penjualan unit toko disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan atau hari kerja berikutnya	Ya	Kas yang diterima setiap harinya langsung disetor ke bank pada hari yang sama atau paling lambat hari berikutnya oleh bendahara

- | | | |
|---|-------|---|
| 3) Perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksaan internal | Tidak | Karena pemeriksaan internal dilakukan pada saat RAT |
|---|-------|---|
- 4) Karyawan yang Mutunya Sesuai Dengan Tanggung Jawabnya
 Karyawan-karyawan yang ada pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik, mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya yang dibutuhkan oleh KPRI INSKO.

Tabel 4.4

Perbandingan Teori Karyawan yang Mutunya Sesuai Dengan Tanggung Jawabnya Dengan Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Teori	Praktik	Keterangan
1) Penerimaan karyawan melalui tes seleksi	Ya	Penerimaan karyawan pada KPRI INSKO sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan
2) Adanya pelatihan bagi karyawan baru	Tidak	Karyawan-karyawan yang diterima langsung bekerja dengan sistem <i>learning by doing</i>
3) Adanya pelatihan bagi karyawan selama bekerja di perusahaan	Ya	Ada pelatihan bagi karyawan lama selama bekerja di KPRI INSKO

B. Fungsi yang Terkait Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas

Pada KPRI INSKO ada fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas. Fungsi-fungsi tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai dengan teori.

Tabel 4.5

Perbandingan Teori Tentang Fungsi yang Terkait Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas dengan Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Teori	Praktik	Keterangan
1) Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas	Ya	Pada KPRI INSKO fungsi ini dilaksanakan oleh bendahara
2) Fungsi Kas	Ya	Fungsi Kas pada KPRI INSKO dilaksanakan oleh bendahara
3) Fungsi Akuntansi	Ya	Fungsi Akuntansi pada KPRI INSKO dilaksanakan oleh bendahara.
4) Fungsi Pemeriksaan Internal	Ya	Fungsi Pemeriksaan Internal

pada KPRI INSKO dilaksanakan oleh Badan Pengawas

C. Prosedur yang Dilaksanakan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas

Dalam menerapkan sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, KPRI INSKO telah melaksanakan sebagian prosedur.

Tabel 4.6

Perbandingan Teori Tentang Prosedur yang Digunakan Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Dengan Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Teori	Praktik	Keterangan
1) Prosedur pembuatan bukti kas keluar	Ya	Pada KPRI INSKO prosedur ini dilaksanakan oleh bendahara
2) Prosedur pembayaran kas	Ya	Pada KPRI INSKO prosedur ini dilaksanakan oleh bendahara
3) Prosedur pencatatan pengeluaran kas	Ya	Pada KPRI INSKO prosedur ini dilaksanakan oleh bendahara yang dicatat dalam laporan arus kas

D. Dokumen yang Digunakan Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Dengan Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Dalam menerapkan sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, KPRI INSKO menggunakan dokumen-dokumen yang terdiri dari bukti kas keluar dan cek.

Tabel 4.7

Perbandingan Teori Tentang Dokumen yang Digunakan Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Dengan Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Teori	Praktik	Keterangan
1. Bukti kas keluar	Ya	Pada KPRI INSKO bukti kas keluar dibuat rangkap dua
2. Cek	Ya	Pada KPRI INSKO menggunakan cek dalam pengeluaran kasnya
3. Permintaan cek	Tidak	Dokumen permintaan cek tidak ada pada KPRI INSKO

E. Catatan Akuntansi yang Digunakan KPRI INSKO Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas

Dalam menerapkan sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara menggunakan catatan akuntansi.

Tabel 4.8
Perbandingan Teori Tentang Catatan Akuntansi yang Digunakan Dalam
Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Dengan
Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi
Sumatera Utara

Teori	Praktik	Keterangan
1. Jurnal pengeluaran kas	Tidak	Pada KPRI INSKO tidak menggunakan jurnal pengeluaran kas, tetapi menggunakan laporan arus kas, laporan pemberian pinjaman tiap bulan, laporan hasil pengawasan unit simpan pinjam, dan laporan hasil pengawasan unit toko.
2. Register cek	Tidak	Pada KPRI INSKO tidak menggunakan register cek dalam catatan akuntansinya

Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

A. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas

1. Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional Secara Tegas Belum Berjalan dengan Baik

Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara masih belum melaksanakan pemisahan beberapa fungsi, seperti:

- a) Fungsi penjualan yang belum dipisahkan dengan fungsi kas, dikarenakan KPRI INSKO belum mempunyai karyawan khusus di bagian penjualan, pembelian, dan kas.
- b) Fungsi kas yang belum dipisahkan dengan fungsi akuntansi, dikarenakan semua pencatatan akuntansi dan transaksi masih dipegang oleh seorang bendahara saja.
- c) KPRI INSKO tidak menerapkan fungsi Gedung terpisah dari fungsi pengiriman.
- d) KPRI INSKO tidak melakukan transaksi penjualan yang dilaksanakan oleh lebih dari satu fungsi

Jadi pada struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas masih belum dilaksanakan secara efektif dalam sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, dikarenakan masih terdapat rangkap fungsi yang dijalankan oleh bendahara yang mengelola beberapa fungsi sekaligus.

2. Sistem Wewenang Dan Prosedur Pencatatan Yang Memberikan Perlindungan yang Cukup Terhadap Kekayaan, Utang, Pendapatan Dan Biaya Belum Berjalan dengan Baik

Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang

cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya masih belum berjalan dengan baik, seperti:

- a) Pengeluaran kas sudah diotorisasi oleh fungsi kas pada KPRI INSKO karena fungsi pengeluaran kas sudah membubuhkan tanda resmi berupa stempel saat kas sudah dikeluarkan.
- b) Penyerahan barang tidak diotorisasi fungsi pengiriman karena pada KPRI INSKO tidak terdapat fungsi pengiriman karena KPRI INSKO tidak menerapkan sistem order.
- c) Pencatatan ke dalam buku jurnal tidak diotorisasi oleh fungsi akuntansi karena fungsi pencatatan akuntansi pada KPRI INSKO sudah dijalankan oleh bendahara.

Jadi sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya masih belum berjalan dengan baik pada sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, dikarenakan hanya pada pengeluaran kas yang sudah diotorisasi oleh fungsi kas.

3. Praktik yang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Setiap Unit Organisasi Belum Berjalan Dengan Baik

Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi masih belum berjalan dengan baik, seperti:

- a) Belum menggunakan faktur bernomor urut tercetak dan belum dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan karena pada KPRI INSKO tidak menggunakan faktur.
- b) Jumlah yang diterima dari penjualan unit toko langsung disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama oleh bendahara pada KPRI INSKO.
- c) Tidak adanya pemeriksaan internal terhadap fungsi kas secara mendadak oleh fungsi pengendalian internal.

Jadi praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi masih belum berjalan dengan baik pada sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, dikarenakan tidak adanya pemeriksaan internal terhadap fungsi kas secara mendadak, sehingga peluang untuk terjadinya penyelewengan kas sangat terbuka lebar.

4. Karyawan yang Mutunya Sesuai Dengan Tanggung Jawabnya Sudah Berjalan dengan Baik

Karyawan-karyawan yang ada pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sudah memiliki mutu yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

- a) Penerimaan karyawan yang melalui tes seleksi sudah dijalankan pada KPRI INSKO karena KPRI INSKO ingin mendapatkan kualitas terbaik dari para karyawan yang akan diterima.
- b) Tidak adanya pelatihan bagi karyawan baru pada KPRI INSKO karena KPRI INSKO menerapkan sistem *learning by doing*.

- c) Adanya pelatihan bagi karyawan selama bekerja di KPRI INSKO karena untuk meningkatkan kemampuan (*skill*) para karyawan.

Jadi karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya sudah berjalan dengan baik pada sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, dikarenakan karyawan-karyawan yang terdapat pada KPRI INSKO sudah melalui tes seleksi dan diberikan pelatihan-pelatihan selama bekerja di KPRI INSKO.

B. Fungsi yang Terkait Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas

Pada KPRI INSKO ada fungsi-fungsi terkait yang sudah sesuai dengan teori dalam sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, seperti fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, fungsi kas, fungsi akuntansi, dan fungsi pemeriksaan internal.

C. Prosedur yang Dilaksanakan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas

Pada KPRI INSKO terdapat prosedur-prosedur yang sudah sesuai dengan teori dalam sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, seperti prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, dan prosedur pencatatan pengeluaran kas.

D. Dokumen yang Digunakan Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Dengan Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Pada KPRI INSKO terdapat dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, seperti bukti kas keluar dan cek. Sementara pada dokumen permintaan cek tidak terdapat pada KPRI INSKO karena dokumen permintan tersebut tidak ada.

E. Catatan Akuntansi yang Digunakan KPRI INSKO Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas

Pada KPRI INSKO tidak terdapat catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, seperti jurnal pengeluaran kas dan register cek yang tidak digunakan pada KPRI INSKO. Tetapi KPRI INSKO hanya menggunakan laporan arus kas, laporan pemberian pinjaman tiap bulan, laporan hasil pengawasan unit simpan pinjam, dan laporan hasil pengawasan unit toko.

Kendala yang Terdapat Dalam Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Dalam melakukan evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara tentunya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti sebagai berikut:

- a. Kurang tepatnya pembagian struktur yang memisahkan tanggung jawab fungsional dengan tegas, karena beberapa fungsi yang masih dijalankan oleh seorang bendahara.
- b. Sistem pencatatan transaksi dan pencatatan laporan keuangan (khususnya laporan arus kas) masih menggunakan sistem manual.
- c. KPRI INSKO menganut sistem kekeluargaan sehingga rasa saling percaya antar sesama anggota sudah terjaga, padahal dalam sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas kita juga harus mengetahui tentang arus kas atau kondisi keuangan KPRI.
- d. Kurang maksimalnya pada sistem wewenang dan prosedur pencatatan, karena masih hanya berfokus pada perlindungan kekayaan, sementara untuk perlindungan utang, pendapatan, biaya belum dilakukan.
- e. Tidak adanya pemeriksaan secara mendadak terhadap fungsi kas, sehingga pengendalian internal terhadap pengeluaran kas tidak berjalan efektif.
- f. Badan pengawas yang menjalankan fungsi pengendalian internal masih diambil dari sesama anggota KPRI INSKO, bukan diambil dari pihak luar yang independen, sehingga peluang terjadinya intervensi pada sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas masih terbuka lebar.

KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil perbandingan teori dan pelaksanaan sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara yang belum sepenuhnya dijalankan oleh KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
2. Hasil evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa:
 - a. Sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan teori unsur-unsur sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, seperti:
 1. Pada struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas masih belum secara efektif dikarenakan masih terdapat rangkap fungsi yang dijalankan oleh bendahara yang mengelola beberapa fungsi sekaligus.
 2. Pada sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya masih belum berjalan dengan baik dikarenakan hanya pada pengeluaran kas yang sudah diotorisasi oleh fungsi kas.
 3. Pada praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi masih belum berjalan dengan baik dikarenakan tidak adanya pemeriksaan internal terhadap fungsi kas secara mendadak, sehingga peluang untuk terjadinya penyelewengan kas sangat terbuka lebar.
 4. Pada karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya sudah berjalan dengan baik dikarenakan karyawan-karyawan sudah melalui tes

- seleksi dan diberikan pelatihan-pelatihan selama bekerja di KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
- b. Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara ada fungsi-fungsi terkait yang sudah sesuai dengan teori dalam sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, seperti fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, fungsi kas, fungsi akuntansi, dan fungsi pemeriksaan internal.
 - c. Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara terdapat prosedur-prosedur yang sudah sesuai dengan teori dalam sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, seperti prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, dan prosedur pencatatan pengeluaran kas.
 - d. Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara terdapat dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, seperti bukti kas keluar dan cek. Sementara pada dokumen permintaan cek tidak terdapat pada KPRI INSKO karena dokumen permintaan tersebut tidak ada.
 - e. Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara tidak terdapat catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, seperti jurnal pengeluaran kas dan register cek yang tidak digunakan pada KPRI INSKO. Tetapi KPRI INSKO hanya menggunakan laporan arus kas, laporan pemberian pinjaman tiap bulan, laporan hasil pengawasan unit simpan pinjam, dan laporan hasil pengawasan unit toko.
3. Adapun kendala dalam evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara adalah:
- a. Kurang tepatnya pembagian struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional dengan tegas.
 - b. Sistem pencatatan transaksi dan pencatatan laporan keuangan (khususnya laporan arus kas) masih menggunakan sistem manual, yang menimbulkan resiko kehilangan yang sangat besar terhadap bukti-bukti transaksi maupun bukti-bukti pencatatan.
 - c. Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara menganut sistem kekeluargaan sehingga rasa saling percaya antar sesama anggota sudah terjaga..
 - d. Kurang maksimalnya pada sistem wewenang dan prosedur pencatatan.
 - e. Tidak adanya pemeriksaan secara mendadak terhadap fungsi kas.
 - f. Badan pengawas yang menjalankan fungsi pengendalian internal masih diambil dari sesama anggota KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, bukan diambil dari pihak luar yang independen.

SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara harus melakukan perbaikan pada sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, khususnya pada bagian badan pengawas yang seharusnya diambil dari pihak independen agar hasil pengendalian internalnya tidak mudah untuk diintervensi pihak manapun.
2. Aktivitas pengeluaran kas memerlukan bendahara tersendiri sehingga seorang bendahara tidak merangkap beberapa fungsi yang berbeda. Pada aktivitas

pengeluaran kas juga seharusnya bisa menggunakan sistem komputerisasi atau digitalisasi terhadap pencatatan transaksi pengeluaran kas agar setiap transaksi pengeluaran kas yang terjadi bisa memiliki bukti transaksi yang permanen dalam bentuk *soft copy* yang otomatis akan tercatat pada sistem sehingga bukti transaksi tidak mudah hilang. Dan pada pencatatan laporan keuangan (laporan arus kas), juga bisa menggunakan aplikasi pencatatan digital seperti *Myob Accounting* agar pencatatan laporan keuangan berjalan lebih efektif dan efisien.

3. Sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara seharusnya bisa memenuhi unsur-unsur sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, agar bisa berjalan dengan baik untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal di masa mendatang.
4. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan bisa dapat memahami evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas dengan baik, atau bahkan bisa lebih baik dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia dan Lilis Setiawati, (2015). *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan Proses dan Penerapan*, Jakarta: Andi.
- Baridwan, Zaki, (2002). *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta: BPFU UGM.
- Hery, (2007). *Siklus Akuntansi Perusahaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, (2002). *Standard Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ishak Bancin, Manajer (Pelaksana Usaha) di KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan, 17 Juni 2021.
- Mardi, (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, (2010). *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Warren, dkk., (2007). *Pengantar Akuntansi Edisi 21*, Jakarta: Salemba Empat.